

Kementerian BUMN Usulkan PMN untuk Hutama Karya Rp 10 Triliun

Oleh Eko Adityo Nugroho dan Agustiyanti

► JAKARTA – Kementerian BUMN mengusulkan penyertaan modal negara (PMN) untuk PT Hutama Karya sebesar Rp 10,1 triliun, yang akan dipenuhi melalui APBN-P 2013 dan 2014, guna mengerjakan proyek tol Trans-Sumatera. Dalam RAPBN-P 2013, pemerintah baru mengalokasikan PMN senilai Rp 2 triliun.

Sekretaris Menteri BUMN Imam Aprianto menuturkan, pihaknya telah mengajukan permintaan PMN untuk Hutama Karya sebesar Rp 10,1 triliun, yang terbagi dalam dua fase, yakni Rp 5 triliun dalam APBN-P 2013 dan Rp 5,1 triliun dalam APBN 2014. Namun, dalam RAPBN-P 2013, pemerintah hanya mengalokasikan PMN untuk Hutama Karya sebesar Rp 2 triliun.

"Di RAPBN-P 2013 memang hanya dialokasikan Rp 2 triliun. Untuk itu, kami akan mengupayakan Hutama Karya bisa memperoleh PMN Rp 8,1 triliun tahun depan," ujar Imam di Jakarta, akhir pekan lalu.

Dengan pemberian PMN tersebut, menurut Imam, Hutama Karya dapat *re-leverage* (meningkatkan) pinjaman kepada perbankan lebih besar lagi guna membiayai pembangunan jalan tol Trans-Sumatera.

Imam menambahkan, pemerintah telah mengeluarkan revisi Peraturan Pemerintah (PP) No 5/2005 tentang Jalan. Dengan terbitnya revisi PP tersebut, maka penugasan kepada Hutama Karya untuk membangun jalan tol Trans-Sumatera sudah dapat dilakukan.

"Sekarang tinggal tunggu Perpres-nya. Kami inginnya tahun ini sudah bisa mulai membangun tiga ruas jalan tol. Tapi, kapan keluar Perpres bergantung pada Presiden," jelas Imam.

Segera Diteken

Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto mengatakan, penugasan langsung kepada badan usaha milik negara (BUMN) untuk membangun tol Trans-Sumatera sepanjang 2.700 kilometer, segera disahkan. Hal itu menyusul telah di-

setujuinya revisi Peraturan Pemerintah (PP) No 5/2005 tentang Jalan pada pekan lalu.

"(Revisi) PP-nya sudah saya paraf. Saya melakukan paraf terakhir setelah Menteri Koordinator Perekonomian dan Menteri BUMN. Sekarang draf sudah berada di tangan Sekretaris Kabinet. Setelah itu ditandatangani (Presiden), baru bisa diproses perpresnya (penunjukan langsung BUMN untuk membangun tol Trans-Sumatera)," kata Djoko Kirmanto di Jakarta akhir pekan lalu.

Menurut Djoko, dalam revisi PP yang sudah diparaf tersebut disebutkan bahwa pemerintah bisa menunjuk langsung BUMN untuk membangun ruas tol Trans-Sumatera apabila ruas tol tersebut tidak diminati investor setelah ditender.

"Namun modal BUMN itu 100% harus dimiliki pemerintah," tambah Djoko.

Di sisi lain, ada tiga ruas tol Trans-Sumatera yang telah ditender, tetapi tidak ada investor yang meminati. Ketiga ruas tol itu adalah Medan-Binjai, Palembang-Indralaya, dan Bukeubeni-Lampung. "Presiden nanti yang menunjuk BUMN untuk membangun tiga tol itu melalui perpres," jelas dia.

Perusahaan negara yang ditunjuk tersebut bakal bertindak sebagai investor dan operator tiga ruas tol itu. Konstruksi pembangunan juga bisa dilakukan oleh BUMN tersebut atau ditender kepada kontraktor lain. BUMN ini juga bisa menjual konsesi

ruas tol yang dimilikinya kepada investor lain guna mempercepat pengembalian investasi.

"Proyek juga bisa dijual lagi karena memang tidak diatur untuk itu," imbuh Djoko.

Namun demikian, kata dia, detail teknis mengenai penunjukan BUMN untuk menggarap tol Trans-Sumatera masih akan dibahas lebih lanjut, termasuk mengenai skema bisnis maupun penyertaan modal negara yang diberikan. Begitu pula mengenai BUMN mana yang ditunjuk pemerintah belum diputuskan.

"Saya kira belum tentu Hutama Karya yang ditunjuk, karena masih ada BUMN lain. Nanti, hal itu diputuskan dalam perpres. Targetnya tahun ini perpres itu sudah terbit," kata dia.

Dihubungi terpisah, Sekretaris Perusahaan PT Hutama Karya Ari Widiantoro mengungkapkan, pihaknya masih menunggu keluarnya payung hukum penugasan pembangunan tol Trans-Sumatera. Perusahaan ini juga siap melaksanakan penugasan dari pemerintah.

Sebelumnya, PT Hutama Karya telah melakukan sinergi dengan tiga BUMN lainnya, PTPN II, PTPN III, PTPN IV, serta perusahaan daerah untuk mempercepat proyek. Mengenai masalah pendanaan, Hutama Karya berharap sepenuhnya pada penyertaan modal negara sebesar Rp 5 triliun untuk tahap pertama. Namun, pemerintah hanya akan memberikan penyertaan modal sebesar Rp 2 triliun.